



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 28 TAHUN 2019

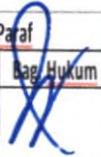
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid 19;
- c. bahwa dalam perjalanan Tahun Anggaran 2020 terdapat perubahan-perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan yang berdampak terhadap program dan kegiatan pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pohuwato tahun 2009-2032;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 – 2021;
14. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.
15. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 28, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 28

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 28, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 28), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan;

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Bab VII Penutup.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal II

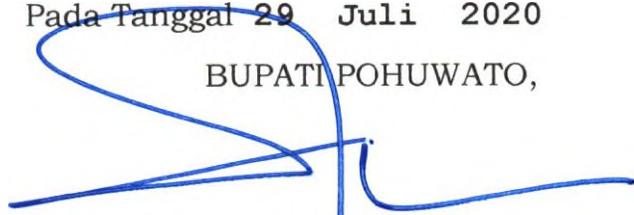
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

Pada Tanggal 29 Juli 2020

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

Pada Tanggal 29 Juli 2020

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019 NOMOR 46

PARAF KOORDINASI								
KABID. PERENC. MU	KEPALA GAPELIT	KABAG. HUKUM	AST. BID. PERENC. MU	AST. BID. PEM	SEDA	WABUP		
								

Pasal II

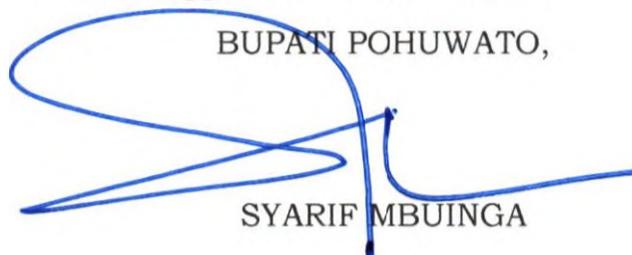
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

Pada Tanggal 29 Juli 2020

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

Pada Tanggal 29 Juli 2020

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019 NOMOR 46

Pasal II

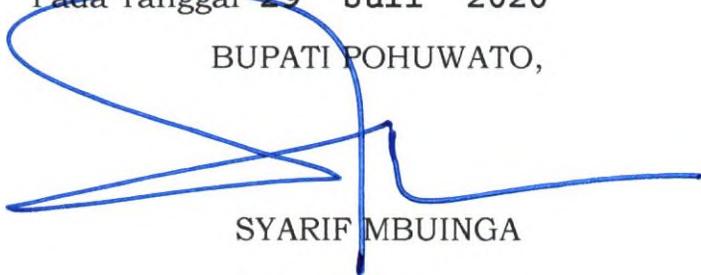
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

Pada Tanggal 29 Juli 2020

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

Pada Tanggal 29 Juli 2020

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019 NOMOR 46

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 46 TAHUN 2020

TANGGAL : 29 JULI 2020

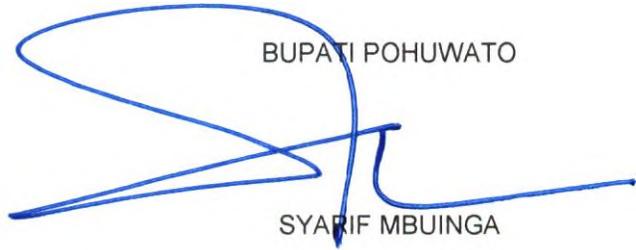
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020.

No	Organisasi Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara		
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
1	Dinas Pendidikan	200.525.219.674,00	172.382.818.356,95	-28.142.401.317,05
2	Dinas Kesehatan	160.415.259.665,00	157.542.545.137,50	-2.872.714.527,50
3	Rumah Sakit Umum Daerah	97.788.874.099,00	98.681.331.199,00	892.457.100,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	74.105.317.840,00	27.720.730.240,26	-46.384.587.599,74
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	28.810.744.217,00	25.810.622.946,00	-3.000.121.271,00
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6.111.363.021,00	5.613.086.945,00	-498.276.076,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	7.108.266.525,00	6.356.866.813,00	-751.399.712,00
8	Dinas Sosial	10.941.372.971,00	10.670.185.872,00	-271.187.099,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.315.178.832,00	4.161.126.277,00	-154.052.555,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.570.270.003,00	3.725.274.666,00	-844.995.337,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.639.681.992,00	8.956.858.921,00	-682.823.071,00
12	Dinas Pangan	6.328.684.797,00	5.666.776.388,00	-661.908.409,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	7.688.903.617,00	7.097.273.430,00	-591.630.187,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.279.530.684,00	4.676.618.873,00	-602.911.811,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.948.986.224,00	5.814.291.669,00	-1.134.694.555,00
16	Dinas Perhubungan	10.577.075.798,00	9.886.765.597,00	-690.310.201,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6.000.760.244,00	5.487.765.283,00	-512.994.961,00
18	Dinas Penanaman Modal	3.733.602.476,00	3.278.696.023,00	-454.906.453,00
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	7.455.648.347,00	6.161.182.817,00	-1.294.465.530,00
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	9.000.752.103,00	3.888.411.141,00	-5.112.340.962,00
21	Dinas Perikanan	11.373.281.275,00	10.460.150.858,00	-913.130.417,00
22	Dinas Pertanian	27.883.534.120,00	24.155.858.364,70	-3.727.675.755,30
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11.350.311.296,00	7.234.045.750,00	-4.116.265.546,00
24	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	572.254.732,00	572.254.732,00	0,00
25	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9.303.198.617,00	9.303.198.617,00	0,00
26	Sekretariat Daerah	29.477.066.156,00	25.676.798.979,00	-3.800.267.177,00
27	Sekretariat DPRD	23.474.172.751,00	21.799.203.060,00	-1.674.969.691,00
28	Kecamatan Paguat	7.364.137.785,00	7.139.929.034,00	-224.208.751,00
29	Kecamatan Dengilo	2.801.860.906,00	2.612.105.486,00	-189.755.420,00
30	Kecamatan Marisa	2.584.777.532,00	2.337.304.267,00	-247.473.265,00
31	Kecamatan Duhiadaa	2.567.622.786,00	2.290.927.128,00	-276.695.658,00
32	Kecamatan Buntulia	2.759.354.300,00	2.509.123.449,00	-250.230.851,00
33	Kecamatan Patilanggio	2.530.082.445,00	2.281.430.120,00	-248.652.325,00
34	Kecamatan Randangan	2.696.183.647,00	2.396.306.544,00	-299.877.103,00
35	Kecamatan Taluditi	2.296.101.833,00	2.031.478.968,00	-264.622.865,00
36	Kecamatan Wanggarasi	2.315.092.499,00	2.036.741.950,20	-278.350.548,80

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

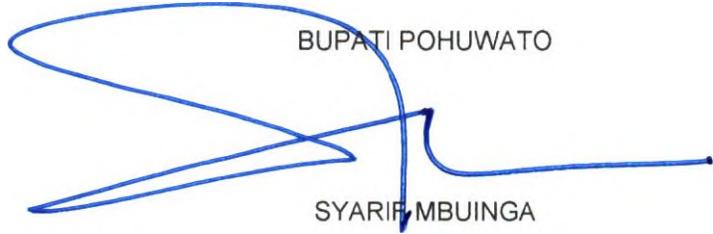
No	Organisasi Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara		
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
37	Kecamatan Lemito	2.632.819.489,00	2.390.842.311,00	-241.977.178,00
38	Kecamatan Popayato	2.777.085.588,00	2.534.842.533,00	-242.243.055,00
39	Kecamatan Popayato Timur	2.684.878.500,00	2.396.176.725,00	-288.701.775,00
40	Kecamatan Popayato Barat	2.552.797.443,00	2.340.149.398,00	-212.648.045,00
41	Inspektorat Daerah	10.073.113.945,00	8.345.607.578,00	-1.727.506.367,00
42	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	7.083.513.574,00	5.241.203.922,00	-1.842.309.652,00
43	Badan Keuangan Daerah	247.148.326.142,00	239.614.046.740,34	-7.534.279.401,66
44	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6.741.763.616,00	5.120.181.477,00	-1.621.582.139,00


 BUPATI POHUWATO
 SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI							
KABID. PERENC.	KEPALA BAKORITAM	KABAG. HUKUM	AST. BID. PERENCANAAN	AST. BID. PEM.	SEDA	WABUP	
							

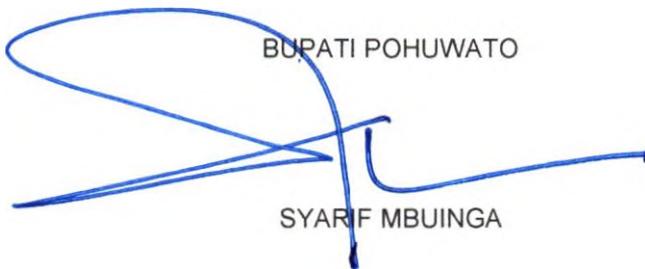
No	Organisasi Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara		
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
37	Kecamatan Lemito	2.632.819.489,00	2.390.842.311,00	-241.977.178,00
38	Kecamatan Popayato	2.777.085.588,00	2.534.842.533,00	-242.243.055,00
39	Kecamatan Popayato Timur	2.684.878.500,00	2.396.176.725,00	-288.701.775,00
40	Kecamatan Popayato Barat	2.552.797.443,00	2.340.149.398,00	-212.648.045,00
41	Inspektorat Daerah	10.073.113.945,00	8.345.607.578,00	-1.727.506.367,00
42	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	7.083.513.574,00	5.241.203.922,00	-1.842.309.652,00
43	Badan Keuangan Daerah	247.148.326.142,00	239.614.046.740,34	-7.534.279.401,66
44	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6.741.763.616,00	5.120.181.477,00	-1.621.582.139,00

BUPATI POHUWATO



SYARIF MBUINGA

No	Organisasi Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara		
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
37	Kecamatan Lemito	2.632.819.489,00	2.390.842.311,00	-241.977.178,00
38	Kecamatan Popayato	2.777.085.588,00	2.534.842.533,00	-242.243.055,00
39	Kecamatan Popayato Timur	2.684.878.500,00	2.396.176.725,00	-288.701.775,00
40	Kecamatan Popayato Barat	2.552.797.443,00	2.340.149.398,00	-212.648.045,00
41	Inspektorat Daerah	10.073.113.945,00	8.345.607.578,00	-1.727.506.367,00
42	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	7.083.513.574,00	5.241.203.922,00	-1.842.309.652,00
43	Badan Keuangan Daerah	247.148.326.142,00	239.614.046.740,34	-7.534.279.401,66
44	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6.741.763.616,00	5.120.181.477,00	-1.621.582.139,00


 BUPATI POHUWATO
 SYARIF MBUINGA